

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damanik, Khairul Ikhwan dkk. 2012. *Otonomi Daerah, Entonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Cv.Alfabeta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Arikunto, *Prosedur Penulisan : Suatu pendekatan Praktek*, PT.Asdimahasatya, Jakarta, 2002
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982
- Yuli Indrawati, *Economic Analysis of Law (EAL)* atas Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dikutip dari buku *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, hlm 256
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm 15 dikutip dari buku *Ibid*.
- M. Syuzairi. Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam Menarik Investasi Asing di Kota Batam. *Jurnal Bahtera Inovasi* Vol. 6 No. 1 Tahun 2022

Jurnal

- Aris Munandar dkk. Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* - Volume 7, No 1, Januari – Juni 2022 hal. 9

Parluhutan Hutahaean. Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia:

Analisis Kointegrasi dan Kausalitas. Kajian Ekonomi Keuangan 3 Nomor 2
Tahun 2019. Hal

Yuli Indrawati, Economic Analysis of Law (EAL) atas Ketentuan Pasal 2 huruf g
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dikutip
dari buku Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, hlm 256

Baharuddin Thahir. Memahami Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah Di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pemerintahan — FPP IPDN. Vol. 1,
No. 2, November 2018: 103 – 114 104 J

Revana Giara Effendy. Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang
Asli Papua. Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 2, Desember 2023 (309-
322)

M. Syuzairi. Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam Menarik
Investasi Asing di Kota Batam. Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 6 No. 1 Tahun
2022

Muhammad Hamdan Sayadi. APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara
Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan
Kebijakan Publik. Indonesian Treasury Review Vol.6, No.2, (2021),
Hal.159–171

Wawan Mulyawan. APBN Dan Pendapatan Nasional. SALAM: Islamic Economics
Journal Volume 1 No 2 ISSN : 2723-5955 (ONLINE); 2745-7478 (CETAK)
Page : 59 – 67

Jonathan Santoso dkk. Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Pagaruyuang Law

Jurnal. Volume 7 No. 1, Juli 2023

Endang Pratiwi dkk. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau

Metode Pengujian Produk Hukum?. Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2,

Juni 2022 hal. 6

Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, (New York: Aspen

Publishers, 2007), hlm 15 dikutip dari buku *Ibid*.

Website

<https://www.antaranews.com/video/3991245/upacara-17-agustus-di-ikn->

dipersiapkan-dengan-detail

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221018195256-92-862308/jokowi->

ungkap-beda-ikn-dengan-ibu-kota-negara-lain

<https://emedia.dpr.go.id/2023/12/24/pembangunan-ikn-dari-apbn-tembus-161->

persen-total-anggaran-banggar-pendanaan-

harusberimbang/#:~:text=Adapun%20rencana%20total%20Anggaran

%20IKN,(Rp252%2C5%20triliun).

<https://jogjaprovo.go.id/profil/3-sejarah>

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/18/080000165/mengintip-kondisi-7->

ibu-kota-negara-yang-pernah-pindah?page=all

<https://indonesian.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Local->

Governments

Nurwidya Kusma Wardhani, 2025

**IMPLIKASI STATUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA
PADA REGULASI KEUANGAN NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id)

https://www.setneg.go.id/baca/index/pertama_kali_presiden_jokowi_pimpin_upacara_peringatan_

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250118164727-4-604213/prabowo-bakal-berkantor-di-ikn-nusantara-mulai-agustus-2028>

<https://ikn.go.id/struktur-organisasi>

<https://www.ikn.go.id/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>

<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7679837/target-baru-ikn-prabowo-berkantor-2028-resmi-jadi-ibu-kota-2029>

<https://nusantara.kemenu.go.id/hut-ri-79-ikn/ibukota-nusantara>

<https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-anggaran-ikn-diblokir-ini-penjelasan-kementerian-pu-1204141>

<https://www.ikn.go.id/selaraskan-dengan-instruksi-presiden-usulan-efisiensi-anggaran-otorita-ikn-2025-disetujui-oleh-komisi-ii-dpr-ri>

<https://www.kemenkeu.go.id/profile/sejarah/sejarah-pengelolaan-keuangan-negara>

<https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-keuangan-ungkap-anggaran-pembangunan-ikn-tembus-rp-43-4-triliun-pada-2024-1190425>

<https://www.kemhan.go.id/kuathan/wp-content/uploads/2021/08/Pengelolaan-BMN.jpg>

DAFTAR PUSTAKA LAINNYA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Nurwidya Kusma Wardhani, 2025

**IMPLIKASI STATUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA
PADA REGULASI KEUANGAN NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara termasuk peraturan-peraturan penunjang
lainnya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang
Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan,
Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

PMK Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset
Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara